

PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

DEVELOPMENT OF ISLAM AND DEMOCRACY STUDY IN INDONESIA

Muhammad Iqbal Sanjaya^{1*}

Nurul Khasyi'in^{2*}

STAI Darul Ulum Kandangan^{*1}

^{*2} Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

*email:

Muhammad.iqbalsanjaya89@gmail.com

*email: nurilkhasyiin@uin-
antasari.ac.id

Abstrak

Realitas mengenai pemahaman demokrasi oleh para tokoh-tokoh politik di Indonesia mengalami perbedaan pendapat pada ada atau tidak ada hubungan Islam dan demokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah ada tiga pandangan yang dianut oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di seluruh dunia mengenai adanya keterkaitan antara ajaran Islam dan demokrasi. *Pertama*, menurut sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman konservatif berpandangan bahwa Islam dan negara adalah entitas yang terpisah karena menurut pandangan mereka Islam telah mengatur sistem sosial secara lengkap. Di antara mereka yang mengikuti pertemuan ini adalah kaum konservatif yang benar-benar mengikuti kebiasaan ide dan praktik politik Islam tradisional atau abad pertengahan. *Kedua*, menurut sebagian kelompok modernis berpendapat bahwa Islam pada dasarnya berasal dari sistem lain, khususnya sistem Barat, yang telah menampakkan keunggulannya, dan bahwa Islam hanya mengatur masalah-masalah duniawi (masyarakat) pada tataran fundamental. Ketiga, kelompok sekuler yang ingin memisahkan Islam dari pemerintah.

Kata Kunci:

Demokrasi;
Islam;
Politik Islam.

Keywords:

Democracy;
Islam;
Political Islam

Abstract

The reality regarding the understanding of democracy by political figures in Indonesia has differing opinions on whether or not there is a relationship between Islam and democracy.

This research is a library research with a qualitative descriptive approach. The results in this study are that there are three views held by Muslim intellectuals and scholars around the world regarding the relationship between Islamic teachings and democracy. *First*, according to some people who have a conservative understanding that Islam and the state are separate entities because in their view Islam has regulated a complete social system. Among those attending these meetings were conservatives who strictly followed the conventions of traditional or medieval Islamic political ideas and practices. *Second* According to some modernist groups, Islam is basically derived from other systems, especially the Western system, which has shown its superiority, and that Islam only regulates worldly issues (society) at a fundamental level. Third, secular groups who want to separate Islam from the government.

PENDAHULUAN

Di Indonesia Islam merupakan agama yang dominan diyakini oleh masyarakat sehingga hubungan antara Islam dan demokrasi sejatinya tidak perlu dipertentangkan karena Islam dan demokrasi pada dasarnya terkait dengan cara yang sangat aksiomatik. Karena Islam adalah agama yang memiliki pelajaran yang berisi standar atau aturan yang mengatur umatnya baik dalam konteks ibadah (*mahdah* dan *ghairu mahdah*), akidah dan akhlak ia bersumber dari wahyu, sedangkan menurut Abdurahman Wahid demokrasi berasal dari ideologi pemikiran manusia, dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri dan demokrasi pun demikian. Namun dari relasi rasional, agama dan demokrasi dapat hidup berdampingan karena menurut ajaran Islam, agama memiliki karakteristik yang sama dengan demokrasi, seperti: *syura*, *musawah*, *'adalah*, *amanah*, *masuliyah* dan *hurriyyah*. (Hartono, 2019).

Munculnya polemik antara demokrasi dengan Islam bermula pada “ketegangan teologis” mengenai adanya doktrin pemahaman sebagian umat Islam terhadap ajaran Islam yang diklaim mampu untuk mengatur baik dalam hal berbangsa dan bernegara atau menerima konsep demokrasi yang lahir dari Barat yang belum menjamin membawa kearah kebaikan. Pertemuan Islam dan demokrasi dapat dikatakan sebagai pertemuan peradaban, ideologi dan dari latarbelakang yang sangat berbeda, Islam lahir di Arab dan Demokrasi dari Yunani. Hasil penelitian Unders Uhlin menarik diungkapkan mengenai demokrasi yang terjadi di Indonesia ia menemukan bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia bersumber dari kristalisasi ajaran Islam dan *marxisme*. (Chalik, 2017).

Kemudian jika kita melihat sejarah pertumbuhan Islam terhadap proses dalam menentukan seorang pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mujar Ibnu Syarif, diantaranya adalah dengan adanya beberapa model pemilihan seperti formatur atau dewan musyawarah, metode revolusi atau kudeta, *ahl al-halli wa al-'aqdi*, penentuan melalui wasiat, metode pemilihan langsung oleh rakyat, dan metode aklamasi berdasarkan nasab. (Zada, 2008). Dari beberapa pola pemilihan pemimpin, saat ini terhadap konteks Indonesia dilakukan pemilihan langsung oleh rakyatnya, melalui proses pemilihan umum yang diklaim sangat demokratis, jika dicermati secara sosio kultural praktik demokrasi sebagai upaya untuk menentukan pemimpin dengan bebas, tanpa adanya intervensi dari manapun hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang prinsip adanya kebebasan.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library reaserch* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penulis peroleh dari berbagai sumber buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu, yang kemudian penulis analisis dan sajikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi demokrasi dengan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata “*demos*” (rakyat) dan *cretein* atau *cratos* (kekuasaan atau kedaulatan). Sehingga dapat dipahami *demos critein* atau *demos cratos* adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat atau juga disebut dengan kedaulatan berada ditangan rakyat. (Abdillah, 1999). Negara yang menganut sistem demokrasi pada hakekatnya adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyatnya. Demokrasi sebagai landasan proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyat menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan menentukan arah kehidupan rakyat. (Winarno, 2014).

Untuk dapat memahami makna demokrasi secara holistik dapat penulis kemukakan beberapa pendapat :

- a. Joseph A. Schmeter

Menurut J. A. Schmeter Demokrasi adalah suatu perencanaan yang dilakukan oleh institusi-institusi untuk mencapai keputusan politik, yang mana seseorang memperoleh kekuasaan untuk dapat memutuskan dan memperjuangkan hak-hak rakyat.

b. Sidney Hook

Menurut Sidney Hook demokrasi dilakukan oleh pemerintahan yang mana keputusan-keputusannya baik secara langsung maupun tidak harus berdasarkan kesepakatan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dewasa sehingga dapat memberikan suara secara bebas.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl

Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl demokrasi adalah suatu sistem yang dilakukan oleh pemerintahan dan pemerintah yang memberikan setiap kebijakan harus bertanggung jawab atas segala keputusannya.

d. Deliar Noer

Menurut Deliar Noer Demokrasi adalah fondasi kehidupan berbangsa adalah bahwa kebijakan nasional menentukan hajat hidup orang banyak, maka pada tingkat terakhir rakyat harus mengambil tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk penilaian atas kebijakan negara.

e. Moh. Mahfud.MD

Menurut Mahfud MD Demokrasi jika dilihat dari segi organisasional, ia merupakan suatu kedaulatan rakyat sehingga setiap penyelenggaraan negara harus mendapat kesepakatan oleh rakyat.

f. Henry B. Mayo

Menurut H.B. Mayo demokrasi sebagai institusi politik digambarkan sebagai suatu keputusan publik yang ditentukan oleh seluruh perwakilan dan secara efektif dikendalikan oleh publik dalam pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana demokratis atas dasar prinsip persamaan politik. menunjukkan bahwa Rakyat menjamin kebebasan politik. (Winarno, 2014).

Dalam proses demokrasi di Indonesia, apa peran demokrasi sebagai landasan pembangunan negara dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah beragamnya elite politik dan dinamika yang dipertontonkan. Keberhasilan atau kegagalan demokrasi bergantung pada empat unsur: 1) Susunan elite politik. 2) Struktur organisasi politik. 3) Perbedaan sikap politik antara elit dan non elit, atau pergeseran budaya politik. 4) peran masyarakat sipil. (Rangkuti, 2018).

Dalam konteks negara Indonesia, sistem demokrasi dilaksanakan dengan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, yaitu proses demokrasi yang mengedepankan proses musyawarah untuk mufakat. Jika dicermati dalam narasi pancasila label demokrasi tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi substansi demokrasi dapat dilihat dari Sila keempat, yang berbunyi: *“kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*. (Bakri, 2012). Demokrasi pada hakekatnya merupakan proses kompetisi politik yang mempengaruhi banyak individu untuk memilih seseorang yang memiliki keistimewaan untuk dapat memimpin dan mengurus negara. Dengan asumsi kita mengikuti nilai-nilai dalam pelajaran Islam, kita akan menemukan beberapa aturan mendasar yang mengontrol hubungan antara masyarakat, negara dan negara sebagai satu kesatuan dengan standar berbasis suara. Seperti prinsip musyawarah, keadilan, prinsip persamaan, dan kepercayaan. (Palamban, 2011). Kemudian menurut Komaruddin Hidayat ada beberapa model yang harus dipikirkan, yaitu: hubungan yang bersifat positif, negatif, atau netral. Hubungan yang pertama diberi nama "Agama versus sistem aturan mayoritas", hubungan selanjutnya diberi nama "Sekularisasi Politik",

dan yang ketiga diberi nama "Teo Demokrasi". Berdasarkan ketiga model tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: (Idris, Islam dan Demokrasi Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi, 2018).

a. Agama versus Demokrasi

Agama dan demokrasi tidak dapat hidup berdampingan dalam model ini, bahkan jika keduanya bertentangan. Agama digambarkan sebagai pemikiran yang moderat dan membelenggu untuk membangun dunianya secara otonom, tanpa dibatasi oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuatan kemapanan dan penguasa yang ketat. Baik masyarakat Kristen di Barat maupun masyarakat Islam di Timur secara historis mengalami hubungan negatif, jika bukan konfliktual, antara keinginan untuk mendirikan masyarakat demokratis dan otoritas agama.

b. Sekularisasi Politik

Dalam sekularisasi politik, agama dan demokrasi tidak bersifat netral. Politik dan agama tidak hidup berdampingan; mereka berproses secara mandiri. Sekularisasi ini dapat berlangsung pada proses sosial, pada tataran kelembagaan formal, atau pada tataran kesadaran metafisik, dan tidak tertutup kemungkinan ketiga tataran tersebut berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Ciri utama kehidupan sekuler adalah personalisasi agama melalui penerapan prinsip-prinsip rasionalitas dan efisiensi pada bidang kehidupan faktual empiris. Karena masyarakat yang mendukung sekularisasi politik dianggap menolak dan anti-agama, mereka kurang percaya pada institusi agama sebagai sarana penyelesaian masalah politik dan ekonomi.

c. Teo Demokrasi

Secara teologis dan sosiologis, model ketiga mendukung demokrasi kebudayaan, ekonomi, dan politik. Semua agama hadir dan diciptakan sepenuhnya untuk menjaga dan memelihara keseluruhan manusia. Oleh karena itu, agama memberikan semangat, etos, dan doktrin yang mendorong kehidupan demokrasi, walaupun agama tidak secara beraturan mengajarkan bagaimana menerapkan demokrasi. Meskipun setiap agama berasal dari Tuhan, namun dalam pelaksanaannya justru membutuhkan orang lain.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tentu sudah terbiasa melihat peran, dinamika, dan kompleksitas politik Islam dalam perkembangan politiknya. Islam telah memainkan peran penting dalam gejolak politik Indonesia sejak sebelum merdeka.. (Hasan, 2022). Sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, umat Islam merasa perlu untuk berpartisipasi aktif dalam politik, karena dalam ajaran Islam tidak hanya semata tuntunan etika dan moral untuk dapat berperan dalam membangun bangsa dan negara, tetapi diperlukan sebuah sistem politik. Sebagaimana dalam sejarah panjang kerajaan Islam. (Susfita, 2015).

Rekam jejak dapat dilihat melalui sudut pandang pengembangan gerakan politik dalam Islam, sehingga politik dalam Islam setidaknya memiliki beberapa fungsi: 1) sebagai pandangan optimal untuk mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk dalam pandangan ajaran Islam. Misalnya, umat Islam harus menentang penjajah Belanda karena dianggap sesat. 2) sebagai sikap dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai. Akibatnya, jika kesalahan seorang pemimpin Muslim tidak diragukan lagi, mereka akan diikuti. Bukanlah hal yang biasa jika sejumlah besar pemimpin pembangunan Islam berasal dari kementerian, kyai atau tokoh lain yang terkenal dengan ketakwaannya. Pada era terdahulu misalnya, penguasa berasal dari seorang yang berpengaruh, 3) Sebagai perekat kekuatan sosial, Islam dipilih sebagai pemersatu sehingga mampu mengatasi pertikaian dalam sosial. (Rasyid, 2008).

Sebelum abad ke-20, pola gerakan Islam politik masih bersifat komunal dengan rasa solidaritas. Struktur masyarakat agraris memupuk solidaritas sosial ini, yang biasanya berpusat pada tokoh-tokoh karismatik. Akibatnya, konsep nasionalisme terbatas pada gagasan etnik budaya. Pada abad ke-19, perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme dipandang sebagai upaya nasionalis untuk melepaskan diri dari penjajahan. Gerakan etnis-budaya juga

mencakup Perang Diponegoro di Jawa Tengah, Perang Padri di Sumatera Barat, dan perlawanan Zaenal Musthofa di Tasikmalaya.

Gerakan Islam mulai mengembangkan pola asosiasi dan solidaritas organik daripada pola komunal. Alih-alih menjadi anggota elit lokal, para pemimpin kini menjadi anggota kelas menengah perkotaan yang berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi. Jika dulu hubungan antara pelopor dan pendukung bersifat paternalistik, pada pertengahan abad ke-20 berubah menjadi lebih bijaksana. Memanfaatkan mekanisme musyawarah juga membuat pengambilan keputusan lebih demokratis dari sinilah mulai muncul dan terbentuk tradisi demokrasi.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Willy Eichler yang dikutip oleh Nurcholis Majid tentang substansi demokrasi tidak boleh statis, ia harus berubah menuju kearah yang lebih baik, menurut Nurcholis Majid ia menekankan demokrasi yang hidup dimasyarakat adalah demokrasi yang seharusnya terus tumbuh dan berkembang kearah yang lebih positif, jika tidak maka belum dapat dikatakan demokratis. (Afifah, 2020).

Mengingat bahwa konsep demokrasi berasal dari Barat, penting untuk diketahui bahwa tekanan dari sumber luar tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi. Penting juga untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara otoriter pada saat itu, dengan sistem politik monarki dan otokrasi. Orang-orang terbiasa mematuhi Raja, dan tidak ada demokrasi, kesetaraan, atau keadilan. (Afifah, 2020). Namun seiring berjalan waktu dan perkembangan zaman negara Indonesia menjadi negara demokrasi hal ini berdasarkan amanah dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila.

Ada tiga pandangan yang dianut oleh para intelektual dan cendekiawan Muslim di seluruh dunia mengenai adanya keterkaitan antara ajaran Islam dan demokrasi. *Pertama*, menurut sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman konservatif berpandangan bahwa Islam dan negara adalah entitas yang terpisah karena menurut pandangan mereka Islam telah mengatur sistem sosial secara lengkap. Di antara mereka yang mengikuti pertemuan ini adalah kaum konservatif yang benar-benar mengikuti kebiasaan ide dan praktik politik Islam tradisional atau abad pertengahan. *Kedua*, menurut sebagian kelompok modernis berpendapat bahwa Islam pada dasarnya berasal dari sistem lain, khususnya sistem Barat, yang telah menampakkan keunggulannya, dan bahwa Islam hanya mengatur masalah-masalah duniawi (masyarakat) pada tataran fundamental. Ketiga, kelompok sekuler yang ingin memisahkan Islam dari pemerintah. Mereka mengklaim bahwa Islam mirip dengan agama lain karena tidak mengatur urusan dunia seperti yang dilakukan Barat. Perspektif ulama tentang demokrasi adalah sebagai berikut: (Afifah, 2020).

- a. Al-Maududi
- b. Salah satu ulama yang menentang demokrasi adalah Al-Maududi. Dia mengklaim bahwa Islam menolak gagasan demokrasi, yang memberi rakyat banyak kekuasaan. Demokrasi biasanya bersifat sekuler karena merupakan produk ciptaan manusia dan oposisi Barat terhadap agama.
- c. Muhammad Iqbal

Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat. Parlemen sebagai salah satu institusi yang krusial dapat saja menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Oleh sebab ini lah Muhammad Iqbal keberatan menerima sistem demokrasi yang lahir dari Barat karena telah kehilangan landasan spiritual dan moralnya. Ia mengusulkan sebuah konsep demokrasi yang berdasarkan moralitas dan etika.

- d. Yusuf al-Qardhawi

Demokrasi sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat dari: *Pertama*, banyak orang yang terlibat dalam pemilihan calon pemimpin. *Kedua*, pemantapan hukum yang berdasarkan suara terbanyak juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. *Ketiga*, Kebebasan pers dan berekspresi, serta kekuasaan kehakiman, adalah dua aspek demokrasi yang sejalan dengan Islam.

d. Salim Ali al-Bahnasawi

Demokrasi mengandung dua sisi, dari segi positif adanya kedaulatan dari rakyat sepenuhnya sedangkan dari sisi negatifnya kekuasaan legislatif tidak terbatas sehingga dapat membenarkan segala cara

e. Muhammad Imara

Muhammad Imara mengatakan bahwa ia tidak menolak sepenuhnya atau menolak demokrasi saat ini karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memegang semua kekuasaan. Sementara itu, dalam kerangka syura (Islam) kekuasaan tersebut adalah kekuasaan Allah. Otoritas sah yang tak tertandingi adalah Tuhan. Untuk sesuatu yang tidak diatur oleh aturan Tuhan, otoritas manusia hanya merencanakan dan membuat aturan sesuai dengan standar ijtihad Tuhan.

Berdasarkan pendapat di atas penulis cenderung terhadap pendapat yang membolehkan demokrasi, karena selama proses demokrasi tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan melaksanakan demokrasi merupakan suatu keharusan di tengah keberagaman budaya dan kepentingan. Sebagaimana dalam realitas sosial masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan proses politik, baik sadar maupun tidak sadar, yang terpenting adalah adanya nilai-nilai Islam yang mengandung kemaslahatan.

Esposito dan Piscatori mengidentifikasi ada tiga pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi. *Pertama*, Islam menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep *syura*, ijtihad, dan *ijma'* merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. *Kedua*, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non-muslim dan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan kesetaraan demokrasi. *Ketiga*, sebagai pandangan awal yang menegaskan Islam sebagai landasan demokrasi. Perlu disadari bahwa kedaulatan rakyat tunduk pada hukum Tuhan, padahal kedaulatan rakyat tidak dapat bersaing dengan kedaulatan Tuhan. Konsep teodemokrasi Al-Maudud memberikan penjelasan seperti itu. (Chalik, Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik, 2017).

Bukti pembeda Esposito dan Piscatori, khususnya pandangan bahwa Islam tidak terpisahkan dari nilai-nilai kekuasaan mayoritas, bukan tanpa alasan. Setidaknya bisa dilihat dari berbagai sisi: pertama, Islam tetap mengikuti kebiasaan ijtihad untuk mendapatkan dan menentukan suatu persoalan. Ijtihad seyogyanya sejalan dengan kebebasan berpikir manusia untuk mendapatkan yang terbaik meskipun tertahan oleh ambiguitas hukum. Kedua, Islam tidak membedakan ras, golongan, suku, warna kulit, kekayaan, atau karakteristik lainnya.

Adapun argumentasi Abdurrahman Wahid (Gusdur) terkait relasi dan agama sebagai berikut: *Pertama*, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan mengakui bahwa setiap orang, dari yang paling berkuasa hingga rakyat jelata, tunduk pada hukum yang sama. Dengan cara lain, peraturan Islam tidak membuat perbedaan bagi kehidupan. *Kedua*, Islam memiliki asas permusyawaratan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesepakatan, Islam memiliki tradisi musyawarah dan penyampaian secara terbuka segala pandangan dan saran. *Ketiga*, ajaran Islam senantiasa menekankan untuk selalu berbuat baik. Karena dunia ini pada hakikatnya hanya merupakan persinggahan untuk mempersiapkan kehidupan diakhirat. Akibatnya, jelas bahwa Islam selalu menginginkan demokrasi, yang merupakan salah satu hal yang menjadikan Islam sebagai agama hukum. (Hamzani, 2019).

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Fahmi Huwaidi ia menyatakan bahwa substansi demokrasi sejalan dengan tuntunan Islam. Fahmi Huwaidi memberikan alasan sebagai berikut: *pertama*: dalam Islam seluruh elemen masyarakat dilarang berbuat dzalim, sehingga menganjurkan agar senantiasa berlu adil, karena semua memiliki kesamaan hak dimata hukum. *kedua* umat Islam tentu tidak mungkin bersepakat dalam hal kedzaliman dan kekufuran. *Ketiga* adanya legislasi dalam sebuah sistem negara tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi terhadap kuasa Tuhan.

KESIMPULAN

Selama ini dalam ajaran Islam kita dapat merasakan dan menerapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur hubungan interaksi masyarakat, berbangsa, maupun bernegara yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti keharusan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam membuat keputusan, mengutamakan keadilan, adanya prinsip persamaan, dan amanah dalam setiap perkataan maupun tindakan. Selama proses demokrasi tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan melaksanakan demokrasi merupakan suatu keharusan di tengah keberagaman budaya dan kepentingan.

Hubungan antara Islam dan demokrasi harus dilihat dengan penekanan pada daerah-daerah tertentu. Sebab bila melihat persoalan Islam dan demokrasi secara universal maka akan saling tarik menarik dan berlawanan. Islam memandang bahwa Islam dan demokrasi tidak selalu berjalan beriringan dan juga tidak selalu berlawanan. Namun perlu diingat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan kebebasan seseorang. .

REFERENSI

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim di Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Afifah, F. N. (2020). Demokrasi Dalam AlQuran Implentasinya di Indonesia. *Kaca Ushuluddin STAI Al Fithrah*, 9.
- Bakri, N. (2012). *Pendidikan Kewarnegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim di Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Afifah, F. N. (2020). Demokrasi Dalam AlQuran Implentasinya di Indonesia. *Kaca Ushuluddin STAI Al Fithrah*, 9.
- Bakri, N. (2012). *Pendidikan Kewarnegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Chalik, A. (2017). *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzani, N. K. (2019). Relasi Agama dan Demokrasi Telaah Kritis Eksistensi Partai Politik Islam di Indonesia. *Sosial dan Budaya Syar'i*, 397.
- Hartono. (2019). *Konsepsi Pemikiran Islam Dan Demokrasi Menurut Abdurahman Wahid*.
- Hasan, N. (2022). *Islam Indonesia 2020*. Yogyakarta: UII Press.
- Idris, S. (2018). *Islam dan Demokrasi Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi*. Aceh: Ar-Raniry.
- Palamban, H. (2011). *Syuro, Demokrasi dan Khilafah Islamiyah dalam Sahiron Syamsuddin (ed), Al-Al-Qur'am dan Isu- Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ.
- Rangkuti, A. (2018). *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. Penegakan Hukum*.
- Rasyid, F. A. (2008). *Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia. Hostoria*, 77.
- Susfita, N. (2015). *Islam dan Demokrasi (Telaah Pemikiran Politik M. Husein Haikal. Tasamuh*, 149.
- Winarno. (2014). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zada, M. S. (2008). *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.